PERBEDAAN MENDASAR ANTROPOLOGI HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ADAT

PRATIWI SULISTIO WATI

Email: pratiwistw@gmail.com

Nomor BP: 2110003600134

Universitas Eka Sakti Padang

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan pancasila. Negara hukum berdasarkan pada pancasila ini berarti suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar negara. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Di mana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin, sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

Dalam hukum memang sulit ditemukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan, karena hukum tidak dapat dilihat dari satu pandangan saja. Kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan karena luasnya lapangan hukum itu, dan kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah dan sebagainya). Objek dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula. Ahli hukum

Plato berpendapat bahwa “hukum adalah system peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat”. Ahli hukum terkenal lainnya yaitu Aristoteles juga berpendapat bahwa “hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim”. Dari dua pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang dibuat sebagai kaidah untuk mengatur dan menata kehidupan semua orang untuk ditaati agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan rukun, apabila dilanggar akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebudayaan manusia mengalami perkembangan pula. Termasuk perkembangan hukum. Peradaban yang semakin berkembang membuat kehidupan manusia sangat membutuhkan aturan yang dapat membatasi perilaku manusia itu sendiri yang telah banyak menyimpang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju. Aturan atau hukum tersebut mengalami perubahan dan terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Untuk itu, suatu negara hukum sangat perlu mengadakan pembangunan terutama dibidang hukum. Agar hukum dapat terwujud dengan baik perlu adanya bidang-bidang studi hukum untuk mengkaji tentang hukum secara khusus.

Ilmu bantu hukum yang menyoroti hukum dari aspek perilaku dan budaya adalah antropologi hukum. Sedangkan cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya adalah sosiologi hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, selain harus taat dengan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi setiap orang kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang tidak tertulis yang sifatnya warisan dari nenek moyang kita dan diturunkan dari generasi ke generasi sesuai adat dan budaya daerah tersebut, inilah yang dinamakan hukum adat.

Hukum adat juga dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan budayanya, disini hukumannya lebih ke saksi social.

B. PEMBAHASAN

1. Antropologi Hukum

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari kata “*Anthropos*”, berarti manusia dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Manusia yang dimaksud disini adalah manusia yang hidup bermasyarakat, bergaul antara yang satu dan yang lain, baik masyarakat yang masih sederhana budayanya (*primitif*) maupun yang sudah modern (maju) budayanya. Sedangkan budaya yang dimaksud disini adalah budaya hukum. Budaya hukum yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Sasaran pokok dalam antropologi adalah manusia, baru kemudian perilaku budayanya. Antropologi dikenal adanya antropologi fisik dan antropologi budaya.

Antropologi fisik terdiri atas:

- *Paleoantropologi*, yakni mempelajari sejarah terjadinya perkembangan manusia sebagai makhluk biologis
- *Sosmatologi*, yakni mempelajari perkembangan manusia dari sudut badaniah.

Sedangkan antropologi budaya terdiri atas:

- *Etnolinguistik*, yakni mempelajari penyebaran dan pertumbuhan Bahasa manusia
- *Prehistory*, yakni mempelajari terjadinya perkembangan dan penyebaran kebudayaan manusia
- *Etnologi*, yakni mempelajari dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat.

Antropologi melihat hukum hanya sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku manusia dan masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan. dan penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat diperbaiki. Perilaku manusia dan masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan pribadi atau masyarakat, yang selanjutnya menjadi adat dan menjadi sistem kontrol sosial akan mempunyai kekuatan hukum, apabila digunakan oleh kekuasaan masyarakat guna mengatur perilaku manusia dan masyarakat bersangkutan agar kehidupannya teratur. Sepanjang masyarakatnya teratur karena ada yang mengatur dan mempunyai kekuasaan, maka pada masyarakat itu terdapat hukum. Jadi hukum itu ada jika ada masyarakat dan ada kekuasaan. Suatu gejala hukum timbul apabila ada perikelakuan yang sedemikian rupa sehingga jika dibiarkan akan mengganggu bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat. Ruang lingkup antropologi hukum hendaknya dikaitkan dengan beberapa fungsi hukum, yaitu sarana pengendalian social, sarana untuk memperlancar interaksi social, dan sarana pembaruan. Dengan demikian kajian antropologi hukum lebih mengupayakan untuk mengungkap nilai yang menjadi dasar atau asas kaedah hukum, misalnya sejarah terjadinya sengketa, pola reaksi, pola pemulihan, dan lain-lain. Maka dapat diketahui anggapan masyarakat mengenai pedoman sikap-tindak/perilaku yang pantas, sehingga dapat diidentifikasi sikap dan perilaku nyata masyarakat, baik berupa mempertahankan nilai-nilai maupun penyimpangan terhadap nilai-nilai.

Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya ia melihat hukum

tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya memenuhi, bahwa melalui manifestasi-manifestasinya sendiri yang khas, hukum itu selalu hadir dalam masyarakat.

2. Sosiologi Hukum

Antropologi hukum juga sangat berhubungan dengan sosiologi hukum, keduanya seperti dua sisi mata logam, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Sosiologi Hukum merupakan cabang yang termuda pada pohon ilmu pengetahuan hukum dan usianya yang muda itu tampak pada hasil-hasilnya yang hingga kini masih sedikit. Itu disebabkan karena ilmu pengetahuan yang baru itu harus mempertahankan diri pada dua kancah perang, sebab hak hidupnya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ditentang baik oleh para ahli hukum maupun oleh para ahli sosiologi. Sosiologi hukum terdiri dari dua pemahaman yang memiliki makna berbeda. Sosiologi, seperti yang kita pahami pada umumnya, merupakan ilmu yang mempelajari mengenai interaksi dalam masyarakat, sedangkan kata hukum kita kenali sebagai salah satu sarana yang memiliki tujuan untuk melaksanakan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki pengertian sebagai salah satu kajian dalam ilmu sosiologi yang membahas berbagai penyebab masalah sosial dan berkaitan dengan hukum yang disepakati oleh masyarakat luas. Kalaupun Sosiologi Hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalanya (Wignjosoebroto, 2002).

Sosiologi Hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat (Chairuddin, 1991:30). Sosiologi Hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Sosiologi Hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan intinya pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagian dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum). Sosiologi Hukum memulai khususnya dari pola-pola pelambang hukum tertentu sebelumnya, seperti mengorganisasi hukum, prosedur-prosedur, dan sanksi-sanksinya, sampai pada simbol-simbol simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti kefleksibelan peraturan-peraturan dan kespontanan hukum (Johnson, 1994:64).

Pemikiran Sosiologi Hukum lebih berfokus pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum. Dari sudut pandang sejarah, sosiologi hukum diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti yang berasal dari Italia, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada dasarnya lahir dari kesepakatan pemikiran para ahli, baik di wilayah filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi (Yesmil Anwar dan Adang, 2008, 109). Pada saat ini, sosiologi hukum tengah berkembang pesat. Disiplin ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, dengan kata lain isi dan bentuknya bersifat dinamis menurut waktu dan tempat, dan juga faktor kemasyarakatan. Salah satu tugas

sosiologi hukum yaitu menjelaskan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik itu dibedakan dalam pembuatan undang-undang dan penerapannya di pengadilan, maka sosiologi hukum itu mempelajari bagaimana praktik tersebut dapat terjadi pada masing-masing kegiatan tersebut. Dalam hal ini sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu dapat terjadi, apa sebab-sebabnya ataupun faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya. Dan dengan demikian mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.
- b. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahian empiris. Sifat khas yang muncul disini adalah mengenai bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan objek yang menjadi sasaran studi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat.

Sosiologi hukum mempunyai persamaan dengan antropologi hukum, keduanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Dengan demikian keduanya juga akan bertemu dalam pandangan dan pendekatan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses yang lebih besar yang didalamnya termasuk hukum. Selain persamaan juga terdapat perbedaan antara antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum

No	Jenis	Antropologi Hukum	Sosiologi Hukum
1	Kajian	Mengkaji hukum dengan mempelajari hukum dengan latar belakang budayanya seperti sejarah, lingkungan hidup, keluarga, pemukiman, politik dan sebagainya.	Mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala social yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara analitis dan empiris .
2	Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengetahui latar belakang suatu kebudayaan • Menghasilkan pola dan penyelesaian daripada sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek yang dikaji benar benar sesuai dengan kenyataan dan tidak bersifat spekulatif • Diketahui factor-faktor yang menyebabkan masyarakat patuh atau tidak dalam mentaati hukum tersebut

3	Kekurangan	Tidak seragamnya hukum dan penyelesaian masalah karena berdasarkan latar belakang kebudayaan dari hukum itu sendiri	Hanya sebatas mengkaji hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala social akan tetapi tidak mengkaji faktor yang menyebabkan penyimpangan dari hukum itu sendiri
4	Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Penemuan fakta • Seleksi • Konstruksi • Dianalisis berdasarkan nilai budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penemuan fakta • Seleksi • Konstruksi • Dianalisis sesuai perundang-undangan • Kesimpulan
5	Objek	Hukum bukan barat, tidak tertulis	Hukum barat/ yang telah dipengaruhi hukum tertulis
6	Subjek	Masyarakat sederhana	Masyarakat modern
7	Perspektif	Budaya	Sosial
8	Penelitian	Kualitatif, studi kasus	Kuantitatif, sampel

3. Hukum Adat

Keberadaan hukum adat juga diakui di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yaitu, "Negara mengakui dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu, di antaranya masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang hukum, yang berlangsung selama waktu tertentu.

Secara hukum, hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi atau melengkapi hukum, asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya. Prof. T.O. Ihromi mengatakan Pendekatan-pendekatan dan metode-metode yang sering digunakan dalam antropologi hukum, juga telah menjadi tradisi dalam ilmu hukum adat. Bahkan sudah jauh-jauh hari Ter Haar menggunakan istilah etnologi hukum, sehingga dapatlah diterima bahwa bidang yang ditelaah oleh antropologi hukum sebagian besar banyak persamaannya. Bahan-bahan hukum adat dapat dimanfaatkan dalam pengembangan antropologi hukum di Indonesia, begitupun sebaliknya metode-metode penelitian dalam antropologi hukum juga dapat bermanfaat bagi hukum adat itu sendiri. Perbedaan dalam hukum adat yang diutamakan adalah identitas dari adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Sedangkan antropologi hukum disamping mempelajari norma hukum juga ditelaah berbagai jenis pedoman perilaku serta hubungan diantara norma itu dengan nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa wawasan antropologi hukum lebih luas karena tidak hanya memperhatikan hukum di Indonesia, tapi juga bersifat komparatif sehingga hukum ditinjau sebagai gejala yang bersifat lintas budaya.

Perbedaan antara antropologi hukum dengan hukum adat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat

No	Jenis	Antropologi Hukum	Hukum Adat
1	Objek	Perilaku manusia	Norma hukum diluar undang-undang
2	Pendekatan	Holistic	Yuridis Normatif
3	Sifat Penelitian	Penelitian lapangan	Studi pustaka dan dokumen
4	Norma	Kenyataan	Dikehendaki

Dari table diatas terlihat bahwa objek antropologi hukum adalah perilaku hukum dari manusia, sedangkan sasarannya aalah norma-norma hukum yang dipakai oleh anggota masyarakat. Selanjutnya pendekatan yang dipakai antropologi hukum adalah holistik, dari kata *whole*, artinya dalam mempelajari sesuatu akan dilihat secara keseluruhan. Kemudian dilihat dari sifat penelitian pada antropologi hukum lebih menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*) dari pada studi pustaka. Sebaliknya hukum adat lebih mengutamakan studi pustaka dan dokumen dari pada penelitian lapangan.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian,ia tidak melihat hukum secara statis melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan. Sebagai fitur penting dalam ilmu tentang

kenyataan, antropologi hukum dalam ruang pembahasannya melihat tentang bagaimana keterkaitan antara hubungan manusia dengan budaya hukum sehingga turut pula mempengaruhi hukum itu sendiri.

Pada sosiologi hukum, bidang ini berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tak hanya dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreatifitas ini terletak pada kemampuan untuk menunjukkan adanya tujuan serta nilai tertentu yang ingin dicapai dalam hukum. Sosiologi akan bisa mengingatkan orang kepada adanya informasi mengenai hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaannya dari suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Gejala sosiologi merupakan tanda-tanda yang muncul dalam kehidupan sosial yang disebut sebagai masyarakat. Dengan konteks yang seperti itu maka dapat dikatakan sosiologi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah dan mengontrol gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala-gejala sosial itu dapat dipengaruhi dan dapat pula saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Sanksi tersebut dapat berupa

dikucilkan oleh masyarakat, denda yang telah ditetapkan oleh adat masing-masing dan yang paling berat adalah diusir dari lingkungan tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201.
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017.
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi UmatBeragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018,
<https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017,
<https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..